

JAPANESE OVERSEAS POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF WATER DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) TIONGKOK

Oleh : Wahyu Srinanda

thataiswahyu@gmail.com

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, MA

Bibliography: 24 Books, 17 Journals, 18 Websites

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrack

This study aims to look at Japan's response to the establishment of China's air defense (adiz) identification zone. Where China on November 23, 2013 announced it had set a unilateral air defense identification zone in most of the east China sea air region which included airspace above the senkaku islands which is currently being fierce with Japan. Besides the unilateral determination of the Chinese ADIZ zone, it also overlaps with Japan's ADIZ. Japan considers that this Chinese action has threatened the country's territorial security.

This study uses the theory of foreign policy, the concept of security dilemma seen from the neorealist perspective. The level of analysis is the nation-state with Japan and China as the main actors. The type of research in this study is descriptive type and data collection techniques are library studies. Data is obtained through books, journals, scientific articles, official documents and internet media.

The results of this study are that Japan, through its foreign policy, responded to China's ADIZ by rejecting the establishment of the Chinese ADIZ because it was considered to have threatened Japanese territorial sovereignty. In order to safeguard its territorial territory, the Japanese government tried to revive the Japanese military by conducting a re-representation of article 9 of the Japanese constitution which was the basis of Japanese military fascism after the Second World War defeat. And Japan also strengthened security cooperation with the United States by reviewing The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation (Guidelines) in 2015

Keywords: Air Defense Identification Zone (ADIZ), my island disputes, foreign policy

Pendahuluan

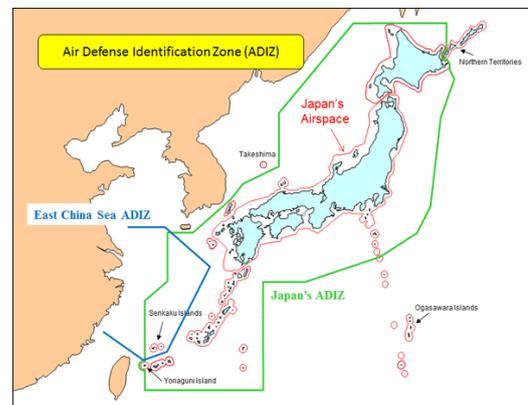
Jepang dan Tiongkok merupakan negara yang dominan di kawasan Asia Timur, karena mengingat keduanya merupakan negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar. Kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang banyak sekali memiliki konflik, terutama konflik sengketa wilayah¹ yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Dari sekian banyak konflik yang terjadi, salah satu permasalahan yang menjadi sorotan dunia internasional adalah sengketa wilayah perebutan Kepulauan Senkaku atau Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok. Perebutan wilayah ini telah terjadi sejak tahun 1972 dan hingga saat ini Kepulauan tersebut belum jelas status kepemilikannya.

Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan gugusan pulau kecil tanpa penghuni, namun kepulauan ini kaya akan sumber minyak dan mineral alam. Laporan PBB tahun 1969 yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh (ECAFE) menunjukkan kemungkinan adanya cadangan besar minyak dan gas di dekat Senkaku.² Selain itu, wilayah penangkapan ikan di sekitar Senkaku dapat menjadi penting bagi Jepang yang memiliki rasio swasembada pangan yang sangat rendah. Apalagi setelah

gempa bumi Maret 2011 di Jepang yang diikuti dengan tsunami serta bencana nuklir telah memberi kerugian besar untuk Jepang. Alasan-alasan inilah yang menandai pemicu saling klaim yang dilakukan oleh Tiongkok dan Jepang.³

Bermula dari sengketa wilayah Kepulauan Senkaku inilah, Pada tanggal 23 November 2013, Tiongkok melalui Kementerian Pertahanan Nasionalnya mengumumkan bahwa Tiongkok sudah membuat ADIZ (Air Defense Identification Zone) baru di Laut Tiongkok Timur. Wilayah ADIZ Tiongkok ini mencakup ruang udara di atas Kepulauan Senkaku, yang berada di bawah ADIZ pemerintahan Jepang, tetapi juga diklaim oleh Tiongkok, yang menyebutnya Kepulauan Daiyutai.⁴ Sehingga ADIZ kedua negara ini menjadi saling tumpang tindih.

Gambar ADIZ Tiongkok



¹Konflik seperti yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan yang mempersengkatakan Pulau Sparty dan Paracel, lalu juga konflik sengketa pulau Dokdo antara Jepang dan Korea, juga kasus sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dan Tiongkok termasuk salah satunya

²P. Greenfield, "Kepulauan Senkakau, Apa yang Dipertaruhkan? ", (2012). tersedia dalam website: www.apdforum.com, diakses pada tanggal 17 Januari 2018

³Pan, "Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands : The Pending Controversy from the Chinese Perspective", *Journal of Chinese Political Science*, Vol. 12,(2007), hal. 2

⁴Martin Sieff, , "ADIZ Baru Tiongkok dan Aturannya yang Keras Menjadi Bumerang", tersedia dalam website: www.apdforum.com, di akses pada tanggal 17 Januari 2018

ADIZ merupakan zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara bagi suatu negara, dimana zona tersebut pada umumnya terbentang mulai dari wilayah teritorial negara yang bersangkutan hingga mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara tersebut, namun penetapan ADIZ yang demikian tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara itu. ADIZ dibentuk atas dasar keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara bagi suatu negara, dimana zona tersebut pada umumnya terbentang mulai dari wilayah teritorial negara yang bersangkutan hingga mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara tersebut. Zona ini mewajibkan pesawat sipil maupun militer untuk melaporkan rencana penerbangannya.

Dalam konteks sejarah pembentukan ADIZ di level internasional, pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada bulan Desember 1950, semasa perang Korea. Lima bulan kemudian Kanada juga mengeluarkan sejumlah peraturan yang diberi nama : *Rules for the Security Control of Air Traffic*. Sama dengan Amerika Serikat, peraturan yang dikeluarkan oleh Kanada itu maksudnya untuk *in the interest of national security, to identify, locate and control aircraft operation within areas designated as within areas designated as "Canadian Air Defence Identification Zone"* (CADIZ).⁵

⁵ Lembaga Pertahanan Nasional, tersedia dalam website www.lemhannas.go.id, di akses pada tanggal 17 januari 2018

Pada tahun 1951 Cooper telah mengajukan pendiriannya bahwa kedaulatan negara itu ditentukan oleh kemampuan negara-negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang yang ada di atas wilayahnya. Cooper menyatakan :

*"...in the absence of international agreement, that the territory of every state extends upward as far into space as it is physically and scientifically possible for any one state to control the regions of space directly above it".*⁶

Teori Cooper ini telah dipergunakan oleh Amerika Serikat dan Kanada dengan ADIZ dan CADIZ. Usaha-usaha Amerika Serikat dan Kanada yang menetapkan beberapa bagian dari Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik sebagai daerah kamanan yang disebut dengan ADIZ dan CADIZ sebenarnya bertitik tolak kepada pengamanan negaranya dari usaha gangguan keamanan yang mungkin tiba-tiba terjadi.

ADIZ Tiongkok mengeluarkan perintah agar setiap pesawat udara yang memasuki zona tersebut melaporkan identitas diri kepada pemerintahan Tiongkok meskipun pesawat tersebut tidak bermaksud mendarat di daratan Tiongkok. Tiongkok pada dasarnya menuntut bahwa setiap pesawat baik komersial atau militer yang harus memberitahukan niat mereka kepada aparat Tiongkok dan mematuhi aturan *aeronautika* negara tersebut atau menghadapi potensi dampak yang parah. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung Tiongkok bertanggung jawab atas ruang udara yang mencakup kepulauan Senkaku, dengan kata lain

⁶Priyatna Abdurrasyid, "Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967", (Bandung, Binacipta, 2000,) hal. 103.

secara *de facto*, Tiongkok Mengklaim bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari wilayahnya.

Langkah-langkah yang diambil Tiongkok dianggap tidak memiliki validitas apapun pada Jepang dan jika mengacu pada hukum internasional yang berlaku, Tiongkok seharusnya segera mencabut kebijakan yang dapat melanggar kebebasan terbang di atas laut bebas karena dapat memicu hal tidak terduga dan berbahaya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe yang menolak manuver Tiongkok di wilayah sengketa.⁷

Setiap negara berhak menerapkan ADIZ di masing-masing wilayahnya akan tetapi tindakan yang dilakukan Tiongkok tidak tepat. Hal ini dikarenakan penetapan ADIZ Tiongkok di tengah konflik sengketa pulau Senkaku/Diaoyu di Laut Tiongkok Timur dengan Jepang telah mengirimkan sinyal yang salah bagi para tetangganya yaitu Jepang, Korea dan Taiwan serta AS. Ini tak hanya dipandang sebagai sebuah rumusan persepsi ancaman namun juga upaya menunjukkan kekuatan dan keteguhan (*assertiveness*) Tiongkok atas klaimnya terhadap pulau Senkaku/ Diaoyu dan kesiapan terhadap eskalasi konflik.

Tiongkok memang berhak untuk membuat ADIZ, tapi dari segi waktu (*timing*) dan tak adanya konsultasi dengan para tetangganya mengakibatkan meningkatnya ketegangan dan mengundang AS

juga menunjukkan kekuatannya yang berpotensi konflik militer. Amerika Serikat melakukan operasi penerbangan rutin dengan menerbangkan dua pesawat bomber jarak jauh strategis B-52 yang tidak dipersenjatai di atas daerah sengketa di Laut Tiongkok Timur pada sebuah latihan udara. Amerika Serikat tidak mematuhi petunjuk Beijing seperti yang dinyatakan pada ADIZ barunya, yaitu mengajukan pemberitahuan sebelumnya bagi semua penerbangan, dan secara jelas mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui ADIZ baru.⁸

Luas ADIZ Tiongkok yang tumpang tindih (*overlap*) dengan ADIZ Korea Selatan dan Jepang telah menimbulkan reaksi resiprokal dimana Korea Selatan pada 8 Desember 2013 mengubah dan memperluas ADIZ-nya yang telah berumur 62 tahun. Perluasan itu mencakup 66.000 km persegi tambahan luas wilayah dari ADIZ yang lama yang juga tumpang tindih dengan ADIZ Tiongkok.⁹

Penetapan ADIZ Tiongkok ini telah menimbulkan reaksi keras dari Jepang dengan mengerahkan pesawat tempur untuk melindungi wilayah udaranya dan mengakibatkan meningkatnya insiden antara angkatan laut kedua negara. Jepang juga meminta penerbangan sipilnya menolak otoritas Tiongkok di wilayah udara yang disengketakan. Amerika Serikat juga menggerakkan pesawat pembom B 52 atas wilayah udara itu tanpa memberitahu Tiongkok.

⁷Pernyataan Abe. Tersedia dalam website: www.tempo.co/read/news/2013/11/25/118532197/Jepang-Protes-Manuver-Cina-di-Wilayah-Sengketa. Diakses pada 05 Februari 2018.

⁹Richard A. Bitzinger, "China's ADIZ: South China Sea Next?, *RSIS Commentaries*", (2013) No. 219.

Jepang merasa keputusan Tiongkok ini jelas merugikan negaranya. Oleh sebab itu respon negatif telah ditunjukkan oleh pemerintah Jepang. Setelah penerapan ADIZ ini Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe langsung memanggil duta besar Tiongkok untuk Jepang untuk memberikan penjelasan mengenai zona tersebut. Shinzo Abe juga berharap akan diadakan dialog antara pemerintah Jepang dengan Tiongkok, dan Tiongkok hendaknya juga memiliki sikap yang sama.¹⁰ Selain itu, Jepang juga menunjukkan sikap bahwa negara ini sama sekali tidak mengakui ADIZ baru yang ditetapkan oleh Tiongkok ini. Hal ini ditunjukkan dengan mengirimkan 2 jet tempur F-15 sebagai respon cepat dari keputusan Tiongkok.

Wilayah ADIZ Tiongkok yang tumpang tindih dengan wilayah ADIZ Jepang menjadi pemicu kembali renggangnya hubungan bilateral antara Jepang dengan Tiongkok. Meskipun masih belum jelas respon seperti apa yang akan diperlihatkan oleh kedua negara, hal ini jelas akan mempengaruhi kualitas kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara.

Penelitian ini menggunakan **Perspektif Neorealis**. Perspektif neorealis merupakan perspektif yang bermula dari perspektif realis dan neoklasik. Pemikir dari perspektif ini adalah Kenneth Waltz yang

¹⁰Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Statement by the Minister for Foreign Affairs on the announcement on the East China Sea Air Defense Identification Zone. The Ministry of National Defense of the People's Republic of China". Tersedia dalam website: www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000098. Diakses pada 05 Februari 2018.

menekankan pada konsep anarki internasional sebagai fokus utama neorealis. Kenneth Waltz juga menganggap perhatian mendasar dari negara adalah keamanan dan kelangsungan hidup serta menganggap bahwa masalah utama konflik negara adalah perang, kemudian tujuan utama dalam hubungan internasional diantara negara-negara adalah perdamaian dan keamanan. Walaupun demikian, neorealis mengabaikan pertimbangan-pertimbangan normatif dalam realisme klasik dan neoklasik dan mencoba menyediakan perspektif yang lebih ilmiah.¹¹ Dalam buku *Theory of International Politics*, Waltz menjelaskan bahwa sistem politik internasional yang berfokus pada struktur sistem, anarki antar unit-unit di dalamnya, serta kesinambungan dan perubahan dalam sistem tersebut.¹²

Terdapat perbedaan mendasar antara neorealisme dengan realisme klasik dan neoklasik, yaitu adanya bahasan mengenai sifat dasar manusia seperti dikatakan oleh Morgenthau dan Schelling. Dalam neorealisme, aktor-aktor tidaklah begitu penting karena struktur memaksa mereka beraksi dengan cara tertentu. Dengan kata lain, struktur mampu menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor.

Penggunaan perspektif neorealisme disini sebagai grand theory dan sekaligus untuk membantu menganalisis kebijakan

¹¹Robert Jackson & Georg Sorensen. "Introduction to International Relations". (New York: Oxford University Press 1999), hal 110-111

¹²Waltz. K. "Theory of International Politics". (New York: McGraw Hill, 1979). hal 97

yang dikeluarkan bila dilihat dengan konsep realisme ofensif dan realisme defensif yang merupakan varian konsep dari neorealisme. Analisis ini bertujuan untuk melihat termasuk dalam konsep apa tindakan yang dilakukan oleh Jepang dan juga Tiongkok dalam mengeluarkan kebijakannya, dan menilai bagaimana seharusnya negara-negara tersebut bertindak dalam studi kasus ini.

Dalam penelitian ini juga menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri Untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara maka sebuah negara perlu untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan yang diterapkan harus memenuhi semua kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional negaranya. Meminjam istilah Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani *foreign policy* merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.¹³ Kebijakan luar negeri juga merupakan serangkaian sasaran bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain baik dibidang politik, ekonomi, sosial, dan militer. Untuk itu aktor-aktor negara melakukan berbagai macam kerjasama baik kerjasama yang bersifat bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Biasanya kebijakan luar negeri ini dapat dilakukan dengan berbagai cara namun terdapat tiga yang paling umum, yaitu melalui

perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi.¹⁴

Konsep Security Dilemma menjelaskan tentang suatu kondisi di mana usaha suatu negara untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dengan menambah kapabilitas pertahanannya berdampak pada munculnya rasa terancam terhadap negara lain, hal itu kemudian memicu negara lain tersebut untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya (*militer*) juga (*military counter-moves*); kondisi ini akhirnya menyebabkan menurunnya atau berkurangnya tingkat keamanan itu sendiri (*lead to anet decrease in security*).

Security dilemmapada pada dasarnya merupakan refleksi dari kesulitan pemerintah suatu negara untuk menentukan pilihan kebijakan keamanannya. Jika suatu negara mengurangi usaha-usaha untuk memperkuat keamanannya dengan tujuan menciptakan hubungan yang damai (*peaceful*) dengan negara lain, maka konsekuensinya adalah negara tersebut rawan (*vulnerable*) untuk diserang oleh negara lain. Namun jika negara tersebut meningkatkan kekuatan pertahanannya maka akan menyebabkan munculnya prasangka atau kecurigaan negara-negara lain sehingga akan memicu terjadinya perlombaan senjata. Kondisi tersebut akan menghadapkan negara untuk lebih mengedepankan cara penyelesaian konflik dengan cara-cara militer (perang) daripada cara-cara diplomasi. *Security dilem* sering kali disebabkan oleh adanya tanda yang ambigu

¹³Anak Agung Banyu Perwita. "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional". (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.) Hal. 47.

¹⁴K.J Holsti. "International Politics A Framework for Analisis 6th ed". (New Jersey A Simon : Schuster Company. 1992) . Hal . 82.

(*ambiguos signals*) yang umumnya muncul dari *military planning*.

Berdasarkan permasalahan di atas, timbul pertanyaan menarik yang akan penulis teliti yaitu: **“Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Jepang Dalam Merespon Pemberlakuan Air Defense Identification Zone (ADIZ) Yang Diterapkan Oleh Tiongkok?”**
“Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Jepang Dalam Merespon Pemberlakuan Air Defense Identification Zone (ADIZ) Yang Diterapkan Oleh Tiongkok?”

Dan tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dinamika hubungan antaral Tiongkok-Jepang.
2. Untuk menjelaskan *Air Defense Identification Zone (ADIZ)*
3. Untuk mengetahui respon Jepang terhadap pemberlakuan *Defense Identification Zone (ADIZ)* oleh Tiongkok

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan langkah pemecahannya.¹⁵

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai

argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe peneliti deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam teknik penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan objektif tentang suatu masalah tertentu, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan kemudian diolah melalui buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, media internet dan bahan-bahan lainnya.

Pembahasan

Konflik sengketa wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok yang telah berlangsung sejak tahun 1972 hingga saat ini membuat hubungan kedua negara menjadi renggang. Pada tahun 2012 Jepang secara resmi menasionalisasikan tiga dari delapan pulau di kepulauan Senkaku/Diaoyu dan mulai memperketat penjagaan di wilayah tersebut. Dibawah kepemimpinan Shinzo Abe, Jepang sering menyuarakan pendapatnya tentang perilaku Tiongkok yang sering dianggap kontroversial serta memicu tensi diantara kedua negara terutama jika hal itu terkait dengan konflik dilaut China Selatan dan tentu saja di Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Pada 23 November 2013 Pemerintah Tiongkok mendeklarasikan Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Laut China Timur. Wilayah ADIZ

¹⁵Wahdi Bahtiar., “*Metode Penelitian Ilmu Dakwah*”. (Jakarta: Logos2001).halaman. 1.

Tiongkok ini mencakup wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang merupakan wilayah sengketa dengan Jepang serta Karang Jeodo yang merupakan wilayah sengketa antara Tiongkok dan Korea Selatan. Sehingga menjadikan Wilayah ADIZ Tiongkok ini tumpang tindih wilayah ADIZ milik Jepang. ADIZ Tiongkok memberikan perintah agar setiap pesawat baik militer ataupun komersil yang akan memasuki wilayah ADIZ nya untuk melaporkan identitas dirinya kepada pemerintah Tiongkok walaupun tidak bermaksud untuk mendarat di Tiongkok.

Tindakan Tiongkok ini mendapat respon negatif dari beberapa negara di Asia Timur, terutama Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Tiongkok mengklaim bahwa penetapan ADIZ Tiongkok merupakan langkah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan teritorial di wilayah udaranya. Namun, negara-negara lain menganggap tujuan sebenarnya Tiongkok mendirikan ADIZ bukan hanya demikeamanan negara, namun juga untuk mendapatkan klaim atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Melihat intensi dan Agresifitas Tiongkok wilayah Laut China Timur Pemerintah Jepang merespon kebijakan ADIZ tiongkok ini dengan menolak secara tegas pemberlakuan ADIZ Tiongkok. Karena wilayah ADIZ Tiongkok yang jga mencakup wilayah udara diatas Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang saat ini berada dalam status quo Jepang. Sehingga Jepang merasa Kedaulatan Negaranya terancam oleh tindakan Tiongkok. Serta, jika dilihat dari poin peraturan ADIZ Tiongkok, peraturan itu bersifat memaksa. Dikatakan bahwa jika negara-negara

yang melintas tidak mau bekerjasama dan menolak untuk menaati peraturan tersebut, maka pemerintahan Tiongkok akan mengambil langkah darurat. Unsur paksaan itu membuat Jepang tidak mau mengakui dan tidak menerima peraturan tersebut, karena tidak memiliki validitas apapun atas Jepang.

Untuk menghadapi Tiongkok di laut China Timur Jepang memperkuat hubungan kerjasamanya dengan Amerika Serikat. Sebelumnya Jepang merevisi pasal 9 Konstitusi Jepang untuk menghidupkan kembali militer Jepang. Hal ini pun didukung oleh sekutunya Amerika Serikat. Jepang juga merevisi perjanjian kerjasamanya dengan AS dengan menyepakati *The Japan-US Defense Guidelines* pada tahun 2015. Guidelines baru ini menyusun kerangka kerjasama dan keseluruhan pemerintahan dalam mempertahankan pulau-pulau terpencil di Jepang. Kedua negara juga secara signifikan memperluas cakupan kerjasama keamanan untuk pertahanan jalur laut dan secara potensial agar jepang dapat berkontribusi terhadap operasi militer Amerika di Luar Asia Timur.

Melihat dari kacamata neorealisme, kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok dan Jepang memiliki karakteristik yang berbeda. Tiongkok, melalui kebijakan Zona Identifikasi Pertahanan Udaranya, sesuai dengan prinsip realisme ofensif, yaitu *fear*, *self-help*, dan *power maximization*, karena ada pandangan bahwanegara yang memiliki kekuatan dan kapabilitas yang besar, akan berpikir dan bertindak secara ofensif terhadap

negara lain. Tiongkok melihat nasionalisasi yang dilakukan Jepang pada tahun 2012 merupakan suatu ancaman, karena legitimasi Jepang akan Kepulauan Senkaku akan semakin kuat.

Tiongkok memberlakukan kebijakan ADIZ tersebut sebagai perwujudan rasa takut, maka Tiongkok berusaha menyaingi Jepang untuk Kepulauan tersebut dengan meningkatkan anggaran belanja militer untuk memberlakukan zona tersebut. *Realisme ofensif* menganggap negara sebagai aktor yang memaksimalkan kekuatan yang agresif. Pada prinsipnya, jika Tiongkok memiliki legitimasi untuk menjalankan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku, tentu Tiongkok akan semakin besar, baik dalam segi teritori, maupun kekuasaan atas sumber daya alam yang ada.

Sebaliknya Jepang, melalui kebijakannya merupakan tindakan yang tidak agresif. Waltz berpendapat bahwa sifat anarkis dari suatu sistem internasional mendorong suatu negara untuk mengambil kebijakan yang bersifat *defensif* dan moderat. Permasalahan utama dari suatu negara adalah bukan untuk memaksimalkan kekuatan, tetapi untuk mempertahankan posisinya di dalam sistem. Kebijakan ini diambil Jepang untuk mempertahankan posisinya sebagai pemegang kedaulatan di Kepulauan Senkaku dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Dilema keamanan menjadi asumsi yang paling utama dalam konsep *realisme defensif*, karena dunia bersifat anarki, dengan tidak ada pemerintahan yang melingkupi, maka survival merupakan motif utama suatu negara. Maka dari itu, negara selalu

berusaha untuk memaksimalkan tingkat keamanan nasional negaranya dari ancaman baik internal maupun eksternal. Kondisi ini yang menimbulkan dilema keamanan.

Melihat intensi Tiongkok yang kabur dan tidak bisa diprediksi, Jepang mengambil langkah defensif berupa meningkatkan kerjasama militer dengan sekutunya dan meningkatkan kemampuan militer negaranya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari rencana untuk revisi artikel 9 konstitusi Jepang untuk militer negaranya, yang pasca Perang Dunia II hanya berfungsi secara penuh untuk defensif saja. Anggaran belanja militer Jepang yang meningkat, merupakan bentuk peningkatan kerjasama Jepang dan Amerika dan upaya Jepang meningkatkan kemampuan militernya. Kedua negara dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip stimulus-respon, memberikan interaksi berupa aksi-reaksi. Tiongkok memberikan aksi berupa menerapkan kebijakan Zona Identifikasi Pertahanan Udara yang memancing Jepang, sehingga Jepang memberikan respon berupa kebijakan untuk menanggapi kebijakan yang Tiongkok keluarkan.

Hubungan aksi-reaksi ini akan terus terjadi dan akan terus terulang sampai kedua negara mencapai kesepakatan. Respon yang dikeluarkan Jepang sepadan dengan stimulus yang diberikan, dan respon akan menyesuaikan dengan stimulus yang . Jepang berjaga-jaga dengan meningkatkan kerjasama militer dan meningkatkan kemampuan militer negaranya, dengan memprediksi perlahan langkah yang akan diambil oleh Tiongkok. Respon yang Jepang berikan juga sesuai dengan karakteristik Jepang sebagai

negara yang damai, memberikan respon secara tenang namun tegas.

Kesimpulan

Setelah Tiongkok menetapkan ADIZ nya pada tanggal 23 November 2013 Jepang mulai menunjukkan rasa keawatirannya atas ancaman Tiongkok ini. Jepang melalui Kementerian Pertahanan Nasional nya merespon penetapan ADIZ Tiongkok ini dengan menolak dan memprotes Tiongkok atas tindakannya ini.

Melihat intensitas dan perkembangan militer Tiongkok, Jepang juga memperbarui makna dari pasal 9 Konstitusi Jepang guna menghidupkan kembali militer Jepang. Dan juga berusaha untuk menyeibangkan kekuatan dengan Tiongkok dengan memperkuat kerja sama keamanan dengan sekutunya Amerika Serikat. Kedua negara sepakat untuk merevisi perjanjian Japan- Us Defense Guidelines pada tahun 2015 yang menggantikan Guidline tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurasyid, Priyatna. *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*. Bandung. Binacipta. 2000.
- Breuning, M. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan. 2007.
- Burchill, S. *Theories of International Relations Third Edition*. New York: Palgrave Macmillan. 2005.
- Collins, A. *The Security Dilemmas of South East Asia*. Basingstoke: MacMillan. 2000.
- Irawan, Soehart. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press. 2000.
- Lovell, J.P. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaption, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1970.
- Markas Besar TNI AU. *Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara*. Jakarta. 2000.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta . PT. Pustaka LP3S:. 1990.
- Morgenthau, H.J. *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America. 1951.
- Prawita, Anak Agung Banyu. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.
- Posen, B.R. *The Security Dilemma and Ethnic Conflic*. 1993
- Wahdi, Bahtiar. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos. 2001.
- Waltz, K. *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill. 1979.
- Wiriadmadja, Suwardi. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1994.

JURNAL

- Baylis, J., & Smith S. "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations". 3rd edition. Oxford: University Press. 2005.
- Herz, John H, "Idealist Internationalism and Security Dilemma". World Politics. Vol. 2. 1950.
- Holsti, K.J. "International Politics : A Framework For Analysis 6th Ed". Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall International

- Pan. “*Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands : The Pending Controversy from the Chinese Perspective*”. *Journal of Chinese Political Science*. Vol. 12, No. 1. 2007.
- Wicaksana, I.G.W. “*Epistemologi Politik Luar Negeri: A Guide to Theory Global & Strategi*”s. *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol.1 (2). 2007.
- Sieff. Martin, “ADIZ Baru Tiongkok dan Aturannya yang Keras Menjadi Bumerang”, tersedia dalam website: www.apdforum.com, di akses pada tanggal 17 Januari 2018
- William B. Heflin, *Diaoyu/Senkaku Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart*, tersedia dalam <http://www.hawaii.edu/aplpi> hal. 4. diakses pada 29 september 2018

WEBSITE

- Ministry of Foreign Affaris of Japan. “Statement by the Minister for Foreign Affairs on the announcement on the East China Sea Air Defense Identification Zone. The Ministry of National Defense of the People’s Republic of China”. Tersedia dalam website: www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000098. Diakses pada 05 Februari 2018.
- Manistry of Defense Japan. ”China's activities surrounding Japan's airspace”. Tersedia dalam Website : http://www.mod.go.jp/e/d_a ct/ryouku/. Diakses pada 05 April 2018.
- P. Greenfield, “Kepulauan Senkakau, Apa yang Dipertaruhkan? “, tersedia dalam website: www.apdforum.com, diakses pada tanggal 17 Januari 2018